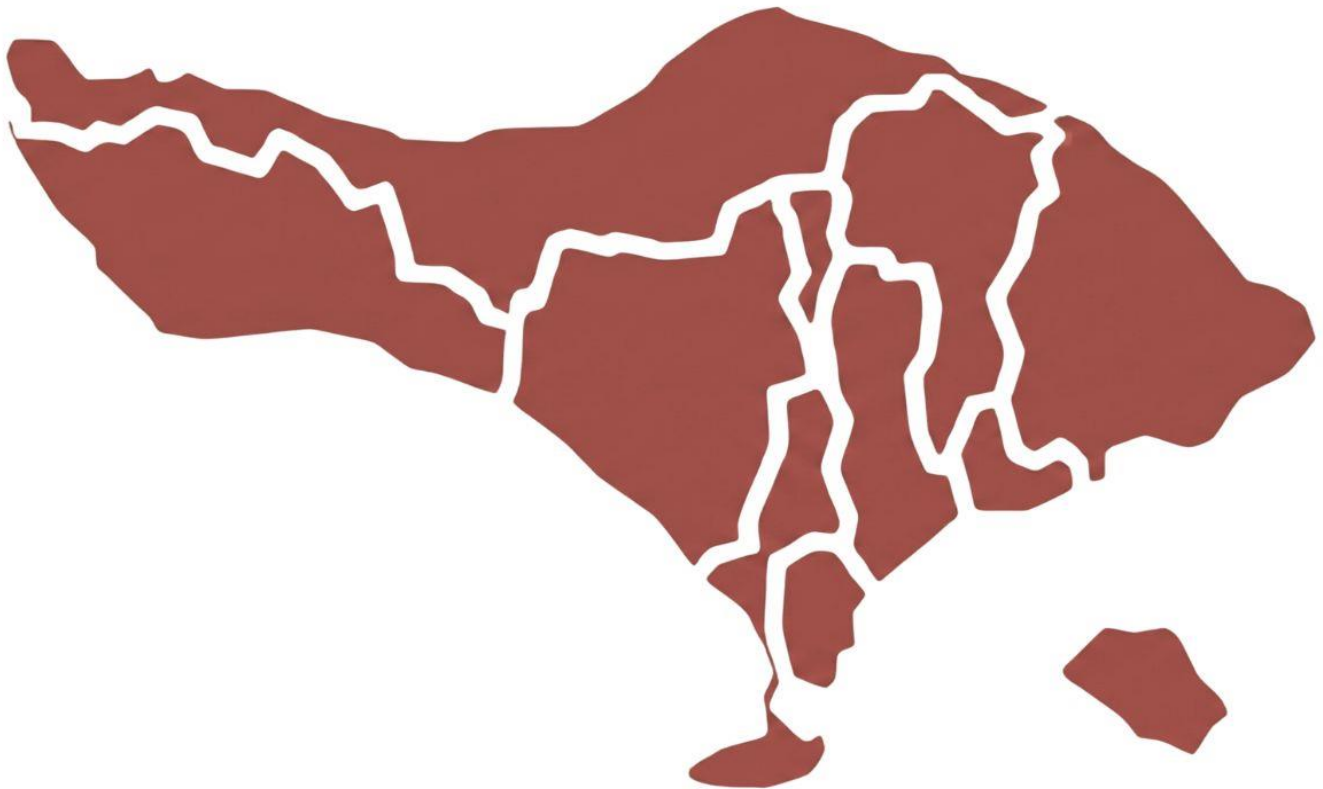




ပိတောက်ပျာမိကျွန်း
PEMERINTAH PROVINSI BALI

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN BILATERAL MEETING TAHUN 2026



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027 dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari tahapan "*Bilateral Meeting*" sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipatif (*participative*) Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.
2. Prinsip Kestinambungan (*sustainable*) Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri atas satu tahap akan tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan

pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dilaksanakan.

3. Prinsip Keseluruhan (*holistic*) Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan, pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial yang diselaraskan dengan RPJMD yang sedang disusun.
3. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja- PD);
4. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
5. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Bilateral Meeting merupakan program inovasi yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Bali sebagai langkah awal dalam rangkaian penyusunan RKPD Semesta Beerencana Provinsi Bali Tahun 2027.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya *Bilateral Meeting* adalah untuk

1. Penajaman rumusan Permasalahan dalam Pembangunan Daerah Tahun 2027 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 serta usulan target dan pendanaan pada tahun 2027. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan agar konsisten untuk menjawab capaian indikator program pada tabel 4.1. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, dan Renstra Perangkat Daerah, serta harus memperhatikan pencapaian target akhir kinerja RPJMD dan Renstra untuk menjamin penuntasan pencapaian kinerja sampai akhir periode RPJMD dan Renstra.
3. Menentukan skala prioritas anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan kedalam 3 Kriteria yaitu:
 - a. *Fixed Cost* yaitu Anggaran Wajib Perangkat Daerah untuk anggaran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK, Gaji dan THR PPPK Paruh Waktu, Gaji dan THR Tenaga PJLP, dan operasional rutin dan wajib seperti listrik, air telpon, dan pemeliharaan kendaraan dinas.
 - b. Belanja Penunjang (Anggaran untuk rehab Gedung, pengadaan Komputer/Laptop).
 - c. Belanja Prioritas (Anggaran untuk mendukung program unggulan perangkat daerah diluar tenaga PJLP).

C. Mekanisme Pelaksanaan

Bilateral meeting dilakukan dengan pola *desk* dialog interaktif, dimana peserta akan dibagi per kelompok yang terdiri dari unsur:

1. Penyaji :
 - a. Perangkat Daerah, sesuai pembagian jadwal
2. Pembahas :

Koordinator :

 - a. Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali
 - b. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Bali.
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali.
 - d. Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Provinsi Bali.

Teknis :

- a. Para Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Bali.
- b. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali.

D. *Output* Pelaksanaan

1. Tersusunnya Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2026 dikaitkan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, untuk mendukung penyusunan Bab II RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027.
2. Tersusunnya Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta usulan target dan pendanaan serta lokasi yang akan diusulkan pada tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 (Tabel 4.1) dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung penyusunan Bab VI RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027.
3. Tersusunnya Skala Prioritas Pendanaan pada masing-masing Perangkat Daerah.

**OUTPUT DITUANGKAN KEDALAM FORMAT BERITA ACARA
SEBAGAI BERIKUT:**

(Berita Acara dibuat per masing-masing Perangkat Daerah)

.....KOP BAPPEDA PROVINSI BALI.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN *BILATERAL MEETING* TAHUN 2026

Nomor:...../ /BPPE/Bappeda

Pada hari tanggal bulan Februari tahun 2026, telah diselenggarakan *Bilateral Meeting* antara Perangkat Daerah dengan Jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Setelah memperhatikan penyajian materi dari Perangkat Daerah dan pembahasan yang ada, maka disepakati:

KESATU : Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pada Perangkat Daerah dalam Pembangunan Daerah Tahun 2027, adalah:

a.

b. Dst

KEDUA : Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana tabel berikut:

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja sampai dengan Tahun 2025	Target Kinerja yang teralokasi pada APBD Induk 2026	Target Kinerja sampai dengan Akhir Tahun Renstra 2025- 2029	Sisa Target Kinerja yang belum tertangani	Rencana Alokasi sesuai Target Kinerja Tahun 2027	Kebutuhan Dana Tahun 2027	Lokasi
1	Program ... Kegiatan Sub Kegiatan:....								

KETIGA : Skala Prioritas Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN (PNS + PPPK)	GAJI DAN THR PPPK PARUH WAKTU	GAJI DAN THR TENAGA PJLP	KESEKRE- TARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRE- TARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1								

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagai bahan Perumusan Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027.

Penyaji,

(Pejabat Perangkat Daerah)
Pangkat
NIP.

Pembahas,

(Pejabat Bappeda Provinsi Bali)
Pangkat
NIP.

JADWAL BILATERAL MEETING TAHUN 2026

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Februari 2026			
1	08.30 – 09.30 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Pengarahan Kepala Bappeda Provinsi Bali	Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Bappeda Provinsi Bali, Para Akademisi, Media Massa, serta seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali
2	09.30 – 12.30 Tempat: RR. Melati Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Infrastruktur Kewilayahan: 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	1. Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. 2. Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP 6. Luh Putu Nia Arisantini Sudibia, S.STP., M.Si. 7. Dewa Ketut Yogiswara, SE. 8. Made Dwi Putra Wiraguna, ST., MT. 9. I Putu Aryawan, ST. 10. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
3	09.30 – 12.30 Tempat: RR. Jempiring Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Perekonomian dan SDA terkait Ekonomi: 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1. Trisno Nugroho, S.E., M.B.A. 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali 4. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 5. I Komang Pasek Guna Wirawan, SE., MM. 6. Ida Ayu Mirah Pertiwi, S.Kom., M.Si 7. Anak Agung Ngurah Mahadiksita Sadhaka, S.Sos. 8.

			9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
4	09.30 – 12.30 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Kesejahteraan Sosial: 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 4. Dinas Kebudayaan	1. Prof. Dr. I Made Damriyasa, M.S. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali 3. Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4. Ni Putu Kristina Dewi, SE., MM 5. Kadek Dwi Sutrisna, S.IP. 6. I Gusti Ketut Budana, S.IP. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
5	12.30 – 13.30	ISTIRAHAT	
6	13.30 – 16.30 Tempat: RR. Melati Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan: 1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. 2. Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Luh Putu Nia Arisantini Sudibia, S.STP., M.Si. 6. Dewa Ketut Yogiswara, SE. 7. Made Dwi Putra Wiraguna, ST., MT. 8. I Putu Aryawan, ST. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
7	13.30 – 16.30 Tempat: RR. Jempiring Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Perekonomian dan SDA terkait Sumber Daya Alam: 1. Badan Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Trisno Nugroho, S.E., M.B.A. 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali 4. I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP 5. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 6. I Komang Pasek Guna Wirawan, SE., MM. 7. Ida Ayu Mirah Pertiwi, S.Kom., M.Si 8. Anak Agung Ngurah Mahadiksita Sadhaka, S.Sos. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
8	13.30 – 16.30 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Pembangunan Manusia: 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 2. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Prof. Dr. I Made Damriyasa, M.S. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali 3. Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4. Ni Putu Kristina Dewi, SE., MM 5. Kadek Dwi Sutrisna, S.IP. 6. I Gusti Ketut Budana, S.IP. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

NO	WAKTU	ACARA	PESERTA/PEMBAHAS
1	09.00 – 12.00 Tempat: RR. Melati Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan: 1. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D. 2. Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5. Luh Putu Nia Arisantini Sudibia, S.STP., M.Si. 6. Dewa Ketut Yogiswara, SE. 7. Made Dwi Putra Wiraguna, ST., MT. 8. I Putu Aryawan, ST. 9. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali
2	09.00 – 12.00 Tempat: RR. Jempiring Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Perekonomian dan SDA Terkait Keuangan dan Investasi: 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Badan Pendapatan Daerah	1. Trisno Nugroho, S.E., M.B.A. 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali 4. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA 5. I Komang Pasek Guna Wirawan, SE., MM. 6. Ida Ayu Mirah Pertiwi, S.Kom., M.Si 7. Anak Agung Ngurah Mahadiksita Sadhaka, S.Sos. 8. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali

3	09.00 – 12.00 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Pemerintahan: 1. Sekretariat DPRD 2. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Biro Umum 4. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian 5. Biro Hukum 6. Biro Organisasi 7. Biro Humas dan Protokol	1. Prof. Dr. I Made Damriyasa, M.S. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali 3. Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4. Ni Putu Kristina Dewi, SE., MM 5. Kadek Dwi Sutrisna, S.IP. 6. I Gusti Ketut Budana, S.IP. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali Bappeda Provinsi Bali
---	---	--	--

4	12.00 – 13.00	ISTIRAHAT	
5	13.00 – 16.00 Tempat: RR. Cempaka Bappeda Provinsi Bali	Penyampaian dan Pembahasan Materi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terkait Pemerintahan: 1. Badan Penghubung 2. Inspektorat 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Satuan Polisi Pamong Praja	1. Prof. Dr. I Made Damriyasa, M.S. 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali 3. Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4. Ni Putu Kristina Dewi, SE., MM 5. Kadek Dwi Sutrisna, S.IP. 6. I Gusti Ketut Budana, S.IP. 7. Tim Admin SIPD/E-Plan Bappeda Provinsi Bali



KEPALA BAPPEDA PROVINSI BALI,

I WAYAN WIASTHANA IKA PUTRA

NIP. 19710814 200003 1 010